



PENETAPAN

Nomor 1836/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1836/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo,

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla



Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0097/097/II/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di XXXX, Kabupaten Blora selama + 5 tahun 8 bulan lamanya dan pada bulan September 2023 Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Blora;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun pada bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang cemburu buta kepada Penggugat dimana Penggugat bekerja sebagai penjual makanan dan Tergugat sering menuduh Penggugat beselingkuh;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberi penjelasan kepada Tergugat dan Penggugat juga sudah meminta izin jika setelah menikah Penggugat akan berdagang dan Tergugat mengizinkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat selalu cemburu dan sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengatai Penggugat seperti anjing, babi, bajingan dan Tergugat sering merendahkan Penggugat;

6. Bahwa pada puncaknya pada bulan September 2023 anatra Penggugat dan Terugat kembali bertengkar karena hal yang sama dan pada saat itu Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat denga tergugat akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla



selama + 1 tahun 2 bulan lamanya;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla



tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang cemburu buta kepada Penggugat dimana Penggugat bekerja sebagai penjual makanan dan Tergugat sering menuduh Penggugat beselingkuh, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1836/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 28 November 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1836/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sukir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | PNBP Cabut | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00
	(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No.1836/Pdt.G/2024/PA.Bla